



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
UNIT LAYANAN PENGADAAN**  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Telepon: 3852478 Faksimili: 3441258

---

Pengumuman Tender dengan Pascakualifikasi  
Nomor: PENG-02/SET.M.EKON.ULP.POKJA/SEWA-PERALATAN-KPPIP/12/2018

Kelompok Kerja Pemilihan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melaksanakan Tender dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan Jasa Lainnya secara elektronik sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan : Pengadaan Jasa Lainnya Sewa Peralatan Kantor Sekretariat Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIP) Tahun Anggaran 2019

Lingkup pekerjaan : Sewa Peralatan Kantor

Nilai total HPS : Rp681.549.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), termasuk pajak-pajak

Sumber pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2019

Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 (dua belas) bulan kalender

2. Persyaratan Peserta

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk usaha perorangan tidak diperlukan izin usaha.
- c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan).
- e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan:
  - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya.
  - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
  - 3) Kartu Tanda Penduduk.
- g. Menandatangani Pakta Integritas.
- h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
  - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
  - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
  - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
  - 5) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan

- 6) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  - i. Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
3. Pelaksanaan Pengadaan  
Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (aplikasi SPSE) pada alamat website LPSE: <http://lpse.lkpp.go.id>. Pemenang pengadaan ini akan dikontrak setelah DIPA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2019 ditetapkan.
4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan  
Dapat dilihat pada *website* LPSE.
5. Calon Penyedia Barang/Jasa dapat mengambil Dokumen Pengadaan dengan mengunduh melalui aplikasi SPSE ([www.lpse.lkpp.go.id](http://www.lpse.lkpp.go.id)).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 5 Desember 2018

Kelompok Kerja Pemilihan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian